



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 926/IV/IX/2016

**DPR RI dan Presiden Berupaya
Ciptakan *Good and Clean Governance***

**Fadli Zon : Rusun Rawa Bebek
Tidak Manusiawi**

**Setjen DPR RI Gelar
Pendidikan Koperasi Syariah**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Ketua DPR RI Ade Komarudin

DPR RI dan Presiden Berupaya Ciptakan *Good and Clean Governance*

Dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9), Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, jujur dan bersih dari manipulasi. Dia juga mengharapkan, agar ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga negara, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.

“ Ini rutin dan bagus untuk terciptanya *clean dan good governance*. Semakin *akuntable* dan semakin transparan kita punya tata kelola keuangan,” ujar Akom begitu Ketua DPR RI biasa disapa.

Di acara yang sama pada awal sambutannya Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi. Tapi masalah nilai-nilai utama yang harus dipegang dalam keseharian setiap penyelenggara negara.

Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.

Senada dengan Presiden Jokowi, Akom menegaskan tugas para penyelenggara negara adalah bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat umum. Dia kurang berkenan jika

ada aparat negara yang hanya sibuk dengan urusan teknis internal.

“Tetapi jangan sampai ini menjadi satu tujuan. Karena tujuan kita adalah bekerja maksimal untuk rakyat. Jangan sampai kantor nanti lembur sampai malam, eh tahu-tahu ngurus SPJ,” ungkapnya dengan tersenyum.

Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan semata-mata berkebutuhan pada prosedur, tapi berorientasi pada manfaat untuk rakyat.

Akom menyambut pernyataan presiden dengan dukungannya. “Pandangan Bapak Presiden kita harus jadi pikiran bersama. Bahwa *clean and good governance* proses yang harus kita lalui dengan baik. Tetapi hasil juga harus kita jadikan fokus pekerjaan kita semua,” harapnya. ■

Bank Penyimpan Dana Haji Diminta Berkontribusi Perbaiki Fasilitas Jamaah

Ketua DPR RI Ade Komarudin yang juga bertugas sebagai Ketua Pengawas dan Rombongan Haji 2016, menilai kekurangan penyelenggaraan haji tahun ini ada pada tenda yang ada di Arafah. Menurut pemantauannya selama berada di Makkah, tenda yang ada di Arafah untuk jamaah haji Indonesia kurang layak, masih banyak fasilitas mendasar yang tidak sesuai dengan standar.

“ Mencari solusi atas masalah tersebut, Akom sapaan akrab Ketua DPR RI mengusulkan agar para pimpinan perbankan bisa berkontribusi dalam perbaikan fasilitas yang dimaksud. Usulannya tersebut berdasar, karena triliunan rupiah dana haji tersimpan di bank, dengan begitu bank tentu sudah mendapat keuntungan banyak dari penyimpanan dana tersebut.

"Untuk tenda di Arafah yang kurang layak kita akan mengundang para pimpinan perbankan yang ditempati dana haji. Sebanyak 84 triliun itu supaya mereka mengeluarkan sisanya. Supaya tenda yang tidak layak di Arafah itu bisa diatasi untuk pelaksanaan haji tahun depan," ungkap Akom saat diwawancarai di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).

Nantinya bisa saja bank-bank yang menyimpan dana haji tersebut memberikan bantuan sosialnya kepada penyelenggaraan haji. Karena dari sisi bisnis, apabila masing-masing jamaah



Ketua DPR RI Ade Komarudin

menyeter Rp25 juta untuk memperoleh nomor porsi dengan waktu tunggu rata-rata 7 tahun, dapat dibayangkan berapa dana yang menumpuk secara tunai di kas-kas perbankan yang kontrolnya berada di

tangan Menteri Agama.

Akom mengatakan, dalam waktu dekat akan mengadakan evaluasi dengan para pemangku kepentingan penyelenggara haji tahun ini. Agar di musim haji tahun depan tidak ada masalah sama yang terulang lagi, akan ditindaklanjuti, sebagai Ketua Pengawas dan rombongan nanti, entah pekan ini atau pekan depan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi instansi yang terkait dengan pelaksanaan haji untuk mengantisipasi haji tahun depan," papar Akom. Sementara itu, terkait kuota jamaah haji, Akom berharap dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Arab Saudi dan beberapa negara tetangga. Harapannya, kuota bisa kembali normal dan jatah di negara tetangga yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan Indonesia.

"Kuota InsyaAllah akan ditambah tahun depan, dan kita akan ada hubungan trilateral antara beberapa negara," jelas Akom. ■

(eko,mp), Foto: Naefuroji/br



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL** **KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs.Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.IIham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) [ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Sepuluh Partai di DPR RI Bisa Usung Capres Sendiri Pada Pilpres dan Pileg Serentak 2019

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjelaskan, sangat terbuka kemungkinan bagi 10 partai yang ada di DPR RI saat ini mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden sendiri, di musim pemilu 2019 mendatang. Itu artinya bisa saja setiap partai memiliki calon pasangan masing-masing. Pernyataan tersebut berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamankan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara serentak.

“Amanat dari Mahkamah Konstitusi dilakukan secara serentak. Berarti harus didasarkan dari hasil pemilu yang lalu. Artinya, logikanya adalah kalau ada 10 partai yang lolos dari *parliamentary threshold*, dan punya perwakilan di dalam legislatif, maka sepuluh partai itu bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri,” jelas Fadli baru-baru ini di Gedung Nusantara III.

Meskipun demikian, dia menilai perlu ada kajian serius terkait teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Karena pada 2019 mendatang, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk pertama kalinya akan dilaksanakan serentak.

“Kita sedang mengkaji, kalau pemilu ini dilakukan secara serentak, antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, maka tentu harus ada dasarnya. Dasarnya adalah pemilu sebelumnya, maka keserentakannya bisa,” ungkap Fadli.

Lalu bagaimana dengan keberadaan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

partai baru yang lolos verifikasi, Fadli menjelaskan, kemungkinan ada dua skenario. "Skenario pertama mereka hanya

bisa ikut di dalam pilpres pada pemilu berikutnya, atau mereka juga diperbolehkan, itu bisa saja tergantung dari keputusan politik," paparnya.

Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Fadli mengisyaratkan setuju jika hasil Pemilu legislatif 2014 menjadi dasar bagi partai politik untuk mendukung calon presiden di Pemilu 2019. Adapun usulan tersebut sebelumnya

dilontarkan oleh Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. ■

(ekamp), Foto: Azka/br

Fadli Zon: Rusun Rawa Bebek Tidak Manusiawi

Menyusul kasus tewasnya bocah tiga tahun di Rusun Rawa Bebek, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa Rusun ini sangat tidak manusiawi, karena tidak layak huni. Tak ada keamanan yang baik bagi penghuninya. Mereka ditempatkan di ruang-ruang sempit. Pemprov DKI harus ikut bertanggung jawab.

“Kita harus hentikan kebiadaban Ahok,” seru Fadli usai meninjau langsung Rusun Rawa Bebek bersama sejumlah anggota DPR RI lainnya, Jumat (16/9). Kunjungan ini merespon atas pengaduan warga rusun yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Seperti diketahui, mereka yang tinggal di rusun ini adalah warga Penjaringan Pasar Ikan yang

sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Mestinya, kata Fadli, Pemprov DKI menyiapkan dulu huniannya dengan sangat baik. Faktor keamanan harus diutamakan.

Satu keluarga menempati kamar yang tidak dilengkapi dapur. Dapurnya jadi satu dengan tempat menjemur. Menurut Fadli, ini sangat berbahaya, karena

berpotensi menyebabkan kebakaran. Warga juga dikutip uang sewa sebesar Rp300 ribu per kamar setelah tiga bulan menempati rusun. Mereka sudah menempati rusun ini sejak 9 April lalu. Selama tinggal di rusun, mereka kehilangan pekerjaan. Transportasi ke tempat kerja lama juga sangat sulit.

Otoritas Pemprov DKI sendiri yang



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdialog dengan warga rusun Rawwa Bebek

ikut hadir menjelaskan bahwa langsung ditarik iuran Rp300 ribu setelah penempatan di rusun ini hanya sementara 3 bulan. Harusnya dibebaskan saja

s a m b i l
menunggu
hunian yang
l a y a k
r a m p u n g
pada Januari
2 0 1 7 .
"Keputusan
P e m p r o v
D K I
menggusur
itu terburu-
b u r u .
Ternyata,
rusun ini
tidak siap.
Masyarakat

sampai Januari saat rusunnya sudah siap. Mereka, kan, korban. Banyak korban tidak dapat ganti rugi sama sekali. Padahal, janji kampanyenya dulu ingin memanusiakan," ungkap Fadli.

Menurut Fadli, adalah hak konstitusional warga untuk mendapatkan hunian yang layak. Penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Ahok nyatanya adalah menggusur orang miskin, bukan mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Janji kampanye dulu yang ingin membangun rumah deret bagi warga miskin, ternyata juga hanya isapan jempol. Bahkan, sambung Fadli lagi, Ahok akan menggusur 110 titik lagi. "Ini membahayakan dan hanya menambah jumlah orang miskin saja," kata Fadli. ■

(mb), Foto: Kresna/br

Masa Depan Pers Ada di Teknologi *Online*

Zaman modernisasi saat ini kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat akurat dan praktis adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Media *online* via internet atau yang disebut juga *cyber media* menjadi sarana masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui, masa depan jurnalisme ada dalam teknologi *online*. Terlebih lagi saat ini akses informasi ada dalam genggam tangan. Tidak bisa dipungkiri, setiap kali ada waktu luang hampir semua orang menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas *online*.

"Menunjukkan masa depan pers kita ada di teknologi *online*, internet dan sebagainya. Ini ditunjukkan karena setiap orang sudah punya *gadget* sendiri. Ini tantangan yang sangat besar untuk media cetak maupun media elektronik lain," papar Fadli, Kamis (16/9) sore.

Pernyataan tersebut dia sampaikan saat kunjungan ke kantor redaksi merdeka.com di Tebet Jakarta Selatan. Kedatangan Fadli sebagai bagian dari silaturahmi diskusi,



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

untuk membicarakan berbagai persoalan dan masalah sekaligus bertukar pikiran.

Menurutnya, media *online* bermanfaat dan penting karena informasi yang disampaikannya cepat, instan dan *real time*. Tidak harus menunggu seperti dahulu, koran cetak harus menunggu keesokan harinya. "Kalau sekarang mungkin hanya

beberapa menit kita sudah bisa membaca beritanya. Sehingga akses kepada informasi menjadi sangat *unlimited*," papar Fadli.

mengatakan saat ini masyarakat bisa bebas memilih media mana yang akan dibaca. Fadli beranggapan masyarakat sudah memiliki preferensi tersendiri, banyaknya media-media informasi menjadikan sumber rujukan masyarakat tidak monoton dan kaku, akses informasi menjadi dinamis.

"Itu kan semua tergantung pilihan, masyarakat bebas memilih media mana yang mau dibaca. Media *online* seperti merdeka.com, detik.com, kompas.com, tribunnews.com dan lain-lain itu adalah pilihan terhadap berita yang ada. Pilihan-pilihan ini sangat terbuka luas, artinya aksesnya menjadi sangat tidak terbatas," jelasnya. ■

(de), Foto: Iwan Armanias/br

DPR RI Ingin Pilgub DKI Jakarta Luber dan Jurdil

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap kompetisi antara seluruh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Taufik menilai, pada momen inilah, saat yang ditunggu bagaimana konstelasi politik berjalan.

Demikian dikatakannya usai menerima kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senayan, Selasa (20/9). Dalam pertemuan yang membahas kondisi politik terkini itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

"Walaupun beda pilihan, beda pandangan, dan beda dukungan, tetapi kerangkanya ini adalah untuk NKRI. Kita harapkan pemilunya luber dan jurdil. Marilah kita sambut tahapan Pilgub DKI ini secara sukacita, tetapi sejalan dengan konteks demokrasi kerakyatan, persatuan harus kita jaga. Jangan sampai ada



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

perpecahan, harus jujur dan adil," himbau politisi dari Fraksi PAN itu.

Politisi asal dapil Jawa Tengah ini

menekankan, sebagai ibukota negara dan pintu masuk Indonesia, menjadikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai momen yang ditunggu-tunggu, karena akan banyak figur calon pemimpin yang bisa dipilih oleh masyarakat.

Senada dengan Taufik, Amien Rais menilai Pilkada di Ibukota memiliki makna yang dalam, karena menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi. Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta berlangsung jujur dan adil.

"Pilkada harus betul luber jurdil, tidak ada *black campaign* atau hal-hal yang diluar dugaan, karena kalau ada kecurangan nanti dampaknya bisa jauh sekali," himbau mantan Ketua MPR itu.

Sebagaimana diketahui, KPU DKI Jakarta membuka pendaftaran Cagub-Cawagub pada 21 hingga 23 September 2016. Sejumlah partai pun kini

tengah menyiapkan kandidat terbaiknya untuk bersaing dalam pencalonan Pilkada DKI 2017. ■

(ann/sf), Foto: Magfauji/br

Komisi I DPR RI Harapkan Kinerja KPI Semakin Baik

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Putra mengharapkan agar kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) semakin baik pasca dilantiknya komisioner yang baru oleh Presiden. Hal itu disampaikan ketika RDP dengan Komisi Penyiaran Indonesia pada Selasa, (20/9) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“ Saya ingin sampaikan selamat atas pelantikan KPI. Dengan wajah baru ini kita harapkan kinerjanya jadi semangat. Semangat baru, harapan baru,” papar Supiadin.

Dalam RDP tersebut, Supiadin menyampaikan permintaan KPID Makasar diberikan kewenangan untuk melakukan sensor terhadap siaran televisi nasional di daerah. Pasalnya kultur dari masing-masing daerah memiliki perbedaan dan ciri khas.

"Materi yang sudah di sensor dan yang tidak di sensor oleh KPI Pusat itu belum tentu juga layak ditonton di daerah karena tidak sesuai dengan kultur daerah. Kan daerah punya kultur dan kearifan lokal yang menurut kacamata nasional itu bagus, tapi menurut kacamata daerah tidak," jelas Supiadin.

Ia pun meminta pendapat dari KPI Pusat soal permintaan KPID Makassar tersebut. "Ini hasil kunker Panja Penyiaran ke Makassar, dan KPID Makassar itu memberi masukan. Sehingga mereka minta ingin diberi peran untuk melakukan sensor terhadap program tv nasional yang siarannya sampai daerah," papar Politisi Nasdem ini.

Selain itu, Supiadin juga meminta penjelasan KPI soal sensor yang tidak kontekstual, semisal siaran olahraga renang. "Tentang sensor yang tidak kontekstual, ya namanya olahraga renang itu memang tidak mungkin pake baju, tetapi ya pakai pakaian renang. Lah kenapa di siaran itu diblur?" tanyanya.

Ini menjadi tantangan baru KPI



Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Putra

untuk dapat menyelesaikan beberapa pertanyaan publik terkait konteks siaran tersebut. Meskipun begitu, Supiadin tetap berharap kinerja KPI semakin baik dengan pasca dilantiknya oleh Presiden pada beberapa waktu lalu. ■

(bump), Foto: Jakarta/br

Komisi IV Gelar FGD di Undip Himpun Masukan RUU Karantina

Dalam rangka menghimpun masukan terkait Rancangan Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Komisi IV DPR RI menggelar *focus group discussion* (FGD) dengan pakar dan Civitas Akademica Universitas Diponegoro, di Gedung Widya Puraya, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Selasa (20/9).

Tim Kunker Spesifik Komisi IV dipimpin Ketuanya, Edhy Prabowo (F-Gerindra) mengatakan, sebagai negara dengan potensi keanekaragaman hayati yang sangat kaya tentu harus mampu memiliki regulasi yang rinci sebagai modal penting bagi pembangunan nasional.

"Indonesia adalah negara nomor dua sesudah Brazil yang memiliki keanekaragaman hayati terbanyak di dunia, harus mampu memperbaiki regulasi terkait hal ini, yang mencakup pangan, pakan, dan energi sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," ungkap anggota DPR RI Dapil Sumsel I ini.



Pertemuan Komisi IV DPR RI dengan para pakar hewan, tumbuhan dan kelautan Undip

Dalam acara ini Undip diwakili para pakar sekaligus staf pengajar di Undip antara lain DR. Didik Wisnu Widjajanto yang menyayangkan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan peraturan karantina, "Kita masih ketakutan untuk dibilang balas dendam dalam menerapkan peraturan barang masuk dari negara lain. Nilai tawar kita sangat

rendah, Apalagi adanya wacana karantina berada di Cina, maupun negara lain, sebaiknya jangan, kita makin mudah diperdaya," ujar Didik.

Menanggapi hal ini, Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi IV Fadholi (F-Nasdem) mengatakan bahwa memang seharusnya tempat karantina didekatkan dengan calon konsumennya.

"Misalnya sapi, dimana ada pintu masuk sapi luar negeri diharapkan di situ ada karantina, yang harus didekatkan dengan konsumen. Karantina di Jawa Tengah ini sangat tidak memadai, perlu kantor karantina dengan perlengkapan yang memadai karena Semarang ini menjadi bagian yang sangat penting dan strategis," jelas Anggota DPR RI Dapil I Jateng ini. ■

DPR RI Tegas Tidak Ampuni Politik Uang

Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menegaskan DPR RI memberikan *zero* toleran terhadap tindakan politik uang dalam Pilkada. Hal itu disampaikan saat RDP dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Dirjen Otda Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (16/9).

Namun, Agung menjelaskan bahwa ada hal yang perlu dikaji lebih dalam soal peristilahan, yakni TSM. "Kita memberikan *zero* toleran terhadap politik uang. Tetapi ada satu hal yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Tentang peristilahan, apakah peristilahan TSM ini tepat dan baku?," tanya Agung.

Politisi Golkar ini menilai penggunaan istilah TSM (terstruktur, sistematis, masif) ini agar Bawaslu mengambil sikap agar tidak terjebak pada politik uang yang unsurnya dilingkup tindak pidana yang itu domain peradilan. Ia pun mengusulkan agar dicari istilah lain yang lebih bisa dipahami masyarakat.

"Dari sisi kami, kami melihat Bawaslu mengguna akan istilah TSM ini supaya mengambil sikap agar tidak terjebak pada politik uang yang unsurnya dilingkup tindak pidana yang itu domain peradilan. Nah, kami ingin menyarankan kalau bisa dicari istilah lain yg lebih tepat dan efektif," paparnya.

"Misalnya, kenapa tidak gunakan prosedur penanganan laporan dugaan pelanggaran politik uang dalam proses pilkada, jangan pakai istilah TSM," sambung Agung.

Agung juga mengatakan bahwa istilah TSM ini konotasinya selain menghindari wilayah pidana juga hanya diperlakukan politik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. "Karena kalau pakai



Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro

istilah TSM, konotasinya disamping menghindari wilayah pidana itu juga konotasinya hanya politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," ujar Agung.

Ia pun kembali menegaskan, walaupun begitu, DPR RI secara prinsip menolak segala apapun politik uang dalam Pilkada. Ia pun juga menginginkan agar peran Bawaslu lebih diperkuat. "Prinsipnya kita ingin aturan ini dibuat untuk memperkuat peran Bawaslu," tutup Agung. ■

(b), Foto: Juyanti/br

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penataan Kewenangan Pemkot dan BP Batam

Komisi II DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan penataan kembali terhadap kewenangan BP Batam dan Pemkot Batam, pasalnya kedua lembaga tersebut kewenangannya sering tumpang tindih, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik kewenangan.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Mendagri, Mensetneg, Menteri Agraria, Ombudsman, Walikota Batam dan BP Batam pada Senin, (19/09) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan kajian tentang penataan kewenangan antara Pemkot Batam dan BP Batam termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat dari UU No 53 Tahun 1999 dan Pasal 360 UU No 23 tahun 2004," ujar Lukman Edy selaku ketua rapat.

Selain itu, secara khusus Komisi II DPR RI juga mendorong ORI untuk terus melakukan kajian yang komprehensif terkait pelayanan publik di Batam. "Komisi II DPR RI menerima dan memahami laporan hasil kegiatan investigasi atas



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman

prakarsa sendiri (own motions investigation) dari ORI. Kami juga mendorong ORI untuk terus melakukan kajian yang komprehensif terkait pelayanan publik di Batam dengan melibatkan stakeholder terkait," papar Lukman.

Hal yang sama juga ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan kajian dan pemetaan

terkait masalah pertanahan di Batam serta ikut terlibat dalam perang terpadu satu pintu. "Komisi II DPR RI mendorong kementerian ATR untuk melakukan kajian dan pemetaan secara komprehensif terkait dengan permasalahan pertanahan dan tata ruang di Batam serta terlibat dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Batam terkait pelayanan perizinan bersama BP Batam dan Pemerintah Kota Batam," papar Politisi PKB ini.

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria untuk mengkaji ulang Keputusan Mendagri No 43 tahun 1977 tentang pengelolaan tanah di Batam. "Komisi VII meminta Kementerian ATR untuk meninjau ulang dan melakukan kajian ulang Kepmendagri No 43 Tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah di daerah industri kota Batam," pungkas Lukman. ■

(b) foto: jayadi/br

Warga Nganjuk Masih Banyak Hidup di bawah Garis Kemiskinan

Warga di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Ngadiboyo, Kec. Rejoso, Jatim, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kaum jompo atau lanjut usia begitu banyak di sini. Akses kesejahteraan masih sangat sulit, baik kesehatan maupun pendidikan.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari dapil Jatim VIII Sareh Wiyono, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/9). Temuan banyaknya warga miskin di Nganjuk ini, dialami Sareh saat membagikan langsung paket daging kurban kepada warga Desa Ngadiboyo pada Hari Raya Idul Qurban lalu. "Saya prihatin masih ada warga Nganjuk yang hidup kesusahan. Pemda Nganjuk harus bertanggung jawab atas kondisi sosial masyarakatnya."

Politisi Partai Gerindra ini, mengaku sangat prihatin melihat warga Ngadiboyo yang berada di wilayah dapilnya itu. Pada Hari Raya Qurban, Sareh mendatangi satu per satu rumah warga setempat dan melihat realitas kemiskinan

tersebut di depan matanya. Desa Ngadiboyo sendiri sangat terpencil dan berada di tengah hutan jati. Pada kesempatan itu, ia membagikan 1600 paket daging kurban lengkap dengan bumbunya berupa kecap, minyak goreng, dan santan.

Sebelumnya, Sareh didampingi dua putranya Argowiyono dan Bimantoro, menyembelih hewan kurban di Rumah Aspirasi miliknya, di Nganjuk. Ada tiga sapi jenis Brahman seberat kurang lebih 400 kg dan dua ekor kambing untuk disembelih. Dengan paket lengkap ini, para penerima paket tinggal memasaknya saja tanpa harus sibuk membeli bumbunya lagi.

Kesehatan Penerima Bidik misi Menjadi Perhatian Panja Beasiswa Dikti dan SM3T

Panitia Kerja (Panja) Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI akan merekomendasikan penambahan ruang lingkup asuransi terhadap kesehatan para mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Hal ini dianggap penting, karena dikhawatirkan jika terganggu kesehatannya, dan akan menghalangi mahasiswa untuk berprestasi.

“Memang ini perlu menjadi perhatian dan rekomendasi Panja terkait penambahan asuransi di bidang kesehatan untuk mahasiswa penerima Bidikmisi, karena faktor kesehatan kerap kali belum terlihat dalam proses rekrutmen,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah usai memimpin pertemuan Panja dengan para Rektor Perguruan Tinggi di seluruh Jawa Barat, di Kampus ITB, Bandung, Jumat (16/9).

Politisi F-PG itu menegaskan penambahan asuransi di bidang kesehatan untuk mahasiswa penerima Bidikmisi memang merupakan salah satu solusi, karena keterlambatan diterimanya beasiswa Bidikmisi dinilai menjadi salah satu penyebab mahasiswa menjadi sakit.

"Sekarang ini mungkin sudah ada asuransinya. Namun perlu kita lihat jenis asuransinya itu seperti apa. Kalau memang

ada hal yang belum tercover, Panja akan merekomendasi agar asuransi bisa men-cover penyakit yang menimpa mahasiswa penerima Bidikmisi," tegasnya.

Sementara terkait rekrutmen mahasiswa penerima Bidikmisi, Ferdi menilai relatif sudah cukup bagus, karena banyak opini dari para rektor di Jabar yang mengatakan Indeks Prestasi (IP) para mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi sampai akhir masa perkuliahan cukup bagus, bahkan bisa bertahan di atas angka 3.00.

"Kan hasil IP-nya bagus, makanya kami tidak mau masalah kesehatan menghalangi prestasi belajarnya," tutur Politisi asal dapil Jabar XI itu.

Ferdi juga menyoroti masalah penambahan satuan biaya dalam beasiswa Bidikmisi, untuk menanggulangi biaya hidup lainnya.

"Jadi soal satuan biaya juga salah satu rekomendasi Panja untuk menanggulangi hal-hal biaya hidup. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit yang berkepanjangan sehingga ada antisipasi, satu sisi menambah satuan biaya, di satu sisi menambah ruang lingkup asuransi," jelasnya.

Kedepannya Ferdi berharap adanya pengecekan terlebih dahulu terhadap mahasiswa penerima Bidikmisi apakah memiliki penyakit kronis atau tidak, agar permasalahan-permasalahan kesehatan ini tidak menjadikan *images* Bidikmisi menjadi tidak baik.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Selain itu, Ferdi juga mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) menambahkan anggaran penerima beasiswa Bidikmisi yang berasal dari APBN dengan APBD. Hal ini penting untuk melengkapi kekurangan anggaran dari APBN bukan malah membuat beasiswa jenis lain.

"Anggaran dari APBN itu masih dianggap kurang makanya Pemda jangan malah membuat jenis beasiswa versi lain tapi melengkapi yang dianggap kurang ini. Sehingga apa yang dianggap satuan biaya itu kurang bisa tertutupi melalui APBD walaupun kecil," tuturnya.

Penambahan anggaran dari APBD ini pun dijelaskan Ferdi ada dalam UU nomor 12 tahun 2012 pasal 74 tentang Pendidikan Tinggi. Bahwa PTN wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terluar, tertinggal paling untuk diterima paling sedikit 20 persen.

"Kuota 20 persen mahasiswa penerima Bidikmisi itu bukan harus diselesaikan melalui APBN semuanya tetapi dapat diperoleh dari APBN, APBD, Perguruan Tinggi (kalau ada usaha sendiri) dan masyarakat," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan yang hanya ditujukan untuk calon mahasiswa tidak mampu atau miskin. ■



Anggota Komisi II DPR RI Sareh Wiyono bersama warga di Kabupaten Nganjuk

"Karena ini perintah agama, pembagian paket daging kurban ini juga sekaligus untuk kepentingan sosial bagi masyarakat miskin Nganjuk yang membutuhkan," ucap Anggota Komisi II DPR RI itu. Warga miskin yang menerima paket daging ini terlihat sangat bahagia dan bersyukur. Mereka bahkan mengaku, baru kali ini ada Anggota DPR RI yang langsung membagikan hewan kurban dari rumah ke rumah. ■

(mb), foto: detikpr/br

(rnm), Foto: Riau/br

Komisi IV Dukung Pemberantasan Hama di Bandung Barat

Sejak zaman Pak Harto yang namanya hama selalu menjadi momok utama dan menjadi prioritas penanganan. Karena masalah hama ini bisa merugikan perekonomian petani.

“ Konsep *greenhouse* yang diusulkan para petani menurut saya tidak menyelesaikan masalah hama. Seperti kasus hama kutu loncat, perlu penambahan dosis dari yang sebelumnya. Menurut saya lambat laun *greenhouse* akan diserang hama juga,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Bandung Barat dan sejumlah petani hortikultura di Kantor Bupati Bandung Barat, Sabtu (17/9) lalu.

Ia menambahkan, *greenhouse* sebenarnya diperlukan untuk daerah yang tanah dan cuacanya tidak bagus. “Saya tidak melihat untuk daerah yang subur seperti Bandung Barat belum terlalu diperlukan *greenhouse*. Saya meminta kepala dinas pertanian fokusnya mengenai hama ini, kalau perlu tambah anggaran yang besar,” ujarnya.

Edhy juga mengharapkan, minimal sektor pertanian hortikultura ini dapat mengurangi peluang impor, karena memang daerah ini punya potensi besar. Misalnya, dalam diskusi dipaparkan 75% pasokan bunga DKI berasal dari daerah Kabupaten Bandung Barat.

Terkait pemasaran, lanjut Edhy, perlu penguatan kepada pemda, lawan kita kelompok menengah tinggi, yang menunggu di tengah jalan, dan dia tahu kebutuhan petani. Pemda harus berani untuk membeli hasil panen para petani, sehingga tidak dimonopoli oleh swasta.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, petani dalam pandangan kami, adalah elemen subjek produksi yang paling lemah dibandingkan dengan pengepul, pemilik modal, dan pelaku pasar.



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dengan Bupati Bandung Barat

Sehingga dari input produksi, permodalan, distribusi dan pasar. Tentu pemerintah harus mengawal hal ini.

Sedangkan, Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra memaparkan potensi pertanian Bandung Barat. Dari

segi pertanian sudah memiliki konsep semi modern. Kontribusi susu di Bandung Barat setara dengan 70% di satu Provinsi Jawa Tengah. Bandung Barat juga merupakan penyuplai sayuran buncis yang diekspor ke Singapura dan Kopi ke Italia. ■

(ikomp), Foto: Juhar/br

Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Segera Angkat Tenaga Penyuluh Menjadi CPNS

Nasib para penyuluh dan tenaga honorer dilapangan terkesan tidak terurus dengan baik, karena para penyuluh tersebut belum memiliki kepastian status yang jelas bagi kelangsungan hidupnya. Dizaman globalisasi ini, para tenaga penyuluh tersebut masih menggunakan cara tradisional, belum ada penambahan teknologi bagi peningkatan sumber daya manusianya.

“ Kita sudah membahas masalah yang sudah berlarut-larut didiskusikan. Para penyuluh dan tenaga honorer itu diharapkan bisa segera diangkat menjadi CPNS, Karena memang hal itu sudah menjadi kebutuhan,” tegas anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R. Abdullah saat RDP dengan Pejabat Eselon I Kementerian

Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK, Kementerian Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Menurutnya, secara prinsipil tingkat urgensi tenaga penyuluhan itu sudah tidak perlu diragukan lagi, sebab semua sepakat bahwa penyuluh ini penting. Tanpa adanya penyuluh kegiatan yang berkaitan dengan pangan tidak akan tercapai.

Perjanjian Internasional Harus Menguntungkan Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta kepada Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk mengetahui secara detail tentang untung rugi bagi Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional. Pasalnya pengusaha-pengusaha nasional ada dalam ruang lingkup Kadin. Lembaga ini merupakan pelaku industri yang langsung merasakan dampaknya.

“ Ini kan harus ditimbang sama Kadin, yang lebih kuantitatif, kalau kita (Komisi VI-red) kan lebih politis. Teknokratik dan datanya Kadin yang lebih tahu,” ujar Aria dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Kadin Bernadino dan Ratna Sari di Nusantara I, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).
mengharapkan
d a l a m



Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima

perjanjian perdagangan internasional Indonesia tidak boleh merugi, negara harus mendapat keuntungan. Aria juga memaparkan pentingnya pemangku kepentingan industri dan perdagangan nasional mengidentifikasi kemampuan Indonesia dalam memasuki perdagangan bebas.

"Kalau perjanjian ini mau ditandatangani posisi Indonesia akan mendapat keuntungan di sektor mana?" tanya Aria kepada Kadin.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Kadin ini sebagai pendalaman guna membahas enam surat presiden perihal rencana ratifikasi. Pertama, tentang protokol perubahan terhadap persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, Australia, dan

Selandia Baru.

Kedua, mengenai perdagangan jasa dalam persetujuan kerangka kerja sama ekonomi menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India. Ketiga, Persetujuan ASEAN mengenai petunjuk alat kesehatan.

Keempat, protokol perubahan ketiga terhadap persetujuan perdagangan barang di bawah persetujuan kerangka kerja sama ekonomi komprehensif di antara pemerintah negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

Kelima, protokol perubahan terhadap persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi komprehensif di antara pemerintah negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.

Keenam, protokol untuk melaksanakan komitmen paket kesembilan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di Bidang jasa. ■

(dop) foto: jakar.br

"Kedaulatan pangan hanya akan menjadi omong kosong jika tanpa adanya penyuluh," tandas Taufiq.

Sesungguhnya persoalan ada pada Kementerian PAN, lanjutnya. Ia berharap khusus untuk tenaga honorer itu harus ada langkah-langkah afirmatif, tidak bisa kalau mereka disamakan dengan tenaga baru.

"Bagi saya masalah ini sangat serius, maka tuntutan saya kepada Kementerian PAN, jangan mengatakan lagi akan "dikaji", sekarang sudah waktunya hasil kajian itu disampaikan kepada kita. Sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang jelas berapa kebutuhan tenaga honorer untuk tahun ini, dan tahun berapa para tenaga penyuluh itu akan diangkat," ucapnya.

Terkait pernyataan yang mengatakan bahwa yang akan diangkat adalah mereka yang berusia dibawah 35 tahun, baginya

hal itu sudah menjadi informasi lawas, lalu bagaimana nasib mereka yang berusia diatas 35 tahun. Kementerian PAN harus menghimbau agar para tenaga honorer itu segera diangkat, sebab kalau tidak nasib mereka akan terlunta-lunta.

Pada kesempatan itu, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengalokasikan formasi pengangkatan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi CPNS pada tahun 2016 sebanyak 6.075 orang. Dan meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang P3K sebagai dasar acuan pengangkatan menjadi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk tenaga harian lepas dan tenaga bantu lainnya.

Dewan juga sepakat dengan pemerintah agar THL TB dan sejenis



Anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R. Abdullah

lainnya dilingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK dapat diakomodir menjadi pegawai ASN pada formasi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. ■

(dop) Foto: Andri/br

Legislator Pertanyakan Berlarutnya *Dwelling Time*

Anggota Komisi V DPR RI Soehartono mempertanyakan penyebab berlarutnya masalah *dwelling time* (waktu tunggu) di beberapa pelabuhan besar Indonesia. Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan 83 Kepala Otoritas Pelabuhan di seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, (19/9).

“ Itu akibat kurangnya pelabuhan atau sistemnya yang jeblok? Saya minta indikasi perbandingan berapa selisih waktu antara Singapura dan Tanjung Priok,” tegas politisi dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Pasalnya, proses bongkar-muat di beberapa pelabuhan seperti Belawan masih membutuhkan waktu yang c u k u p p a n j a n g, hingga lebih dari 5 hari



Anggota Komisi V DPR RI Soehartono

dari yang semestinya 2 hari. Bahkan di Makassar, yang merupakan gerbang Indonesia Timur, *dwelling time* sampai 7 hari. Sementara Tanjung Priok masih mencapai 3 hari. Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

menyebutkan biaya logistik di Pelabuhan Indonesia yang termahal di dunia. Biaya logistik pelabuhan Indonesia mencapai 27 persen. Sementara di negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia maupun India berada di angka 15 persen.

Menurut politisi dari dapil Jatim VIII itu, seharusnya tiga pelabuhan penting di Jawa dikerahkan secara bersama-sama untuk mengurangi waktu bongkar muat kapal. "Kontainer itu kan berpusat di Jawa terutama di Jakarta, seharusnya sudah ada pemikiran untuk mengerahkan Tanjung emas, Tanjung Perak dan Tanjung Priok secara bersama-sama, otomatis *dwelling time* akan berkurang. Seberapa baik manajemennya, tapi kalau tangkernya melimpah ruah kan sulit juga," imbuhnya. ■

(ann.mp), Foto: Andri/dr

Komisi X DPR RI Berharap Kemenristek Dikti Perbanyak Beasiswa PPA

Anggota Komisi X DPR RI, Noor Achmad berharap Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi dapat memperbanyak beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Hal tersebut diungkapkannya menyusul masukan dari wakil rektor Universitas Sumatera Utara (USU) dan beberapa perguruan tinggi negeri lainnya di Sumatera Utara, Jumat (16/9).

“ Tadi ada keluhan sekaligus masukan dari USU dimana pihaknya mendapat kuota beasiswa PPA yang masih sangat minim, mengingat di USU banyak memiliki mahasiswa berprestasi yang indikatornya sudah jelas yakni berdasarkan prestasi akademik (IPK-red),” ujar Noor di ruang rapat rektorat USU.

Dilanjutkannya, beasiswa PPA sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetisi kedepan dan akan diisi oleh orang-orang atau generasi unggul seperti itu, sehingga bangsa



Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad

kita akan siap dalam menghadapi persaingan global mendatang.

"Artinya mereka yang mendapatkan beasiswa merupakan orang-orang yang benar-benar berprestasi. Dengan begitu kedepan kompetisi akan diisi oleh orang-orang yang berprestasi juga. Hal ini sangat baik bagi bangsa ini dalam menghadapi persaingan global," tambah politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Pada kesempatan itu wakil rektor I USU, Rosmawati dan wakil rektor II USU, Muhamad Fidel Ganis Siregar menyampaikan bahwa tahun 2016 jumlah penerima beasiswa PPA di USU berjumlah 1000 orang. Sementara jumlah keseluruhan mahasiswa USU 49.091 mahasiswa. Sejatinya jumlah penerima beasiswa PPA di USU bisa bertambah mengingat jumlah mahasiswa berprestasi di kampus tersebut pun cukup banyak. ■

(gpn), Foto: Ayul/dr

Peraturan 'Sebulan Telat Bayar = Kepesertaan Non Aktif' Perlu Uji Publik

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan terkait peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 'sebulan telat bayar langsung non aktif', menurutnya secara substansi memiliki semangat baik untuk mendisiplinkan peserta, namun sebaiknya dilakukan uji publik terlebih dahulu.

“BPJS Kesehatan sebaiknya secara massif melakukan sosialisasi serta mempertimbangkan faktor sosiologis masyarakat kita. Karena faktanya, dalam pembayaran pajak atau pembayaran cicilan kredit masih belum lancar,” ujarnya melalui rilis kepada Parlemen, Senin (19/9).

Lebih lanjut, politisi fraksi Partai PPP ini meminta agar penerapan Peraturan BPJS Kesehatan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai menjadi kontra produktif.

"Sebelum membuat aturan yang sifatnya memaksa lebih baik BPJS Kesehatan terlebih dahulu memperbaiki data kepesertaan. Karena di lapangan banyak ditemui kartu-kartu KIS yang pemilikinya sudah meninggal. Ini tentu akan mengurangi efektifitas kinerja BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan kualitas pelayanan bagi

peserta. Karena faktanya, tidak sedikit keluhan terhadap layanan BPJS Kesehatan,” tuturnya

Okky menegaskan jika layanan BPJS Kesehatan telah berjalan sempurna, peserta tak perlu lagi diancam-ancam, namun akan muncul kesadaran diri untuk mengiur karena merasakan manfaat dan pelayanan yang prima.

Dan untuk rencana tahun 2019 terkait kepesertaan semester (universal coverage), BPJS Kesehatan harus memikirkan kemudahan-

kemudahan cara bayar yang memudahkan masyarakat, agar tercapai dengan baik dari pada memberikan sanksi-sanksi yang mengancam dan membuat situasi jadi kontra-produktif. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

(mb), foto: ista/br

Legislator Dorong RUU Sistem Perbukuan Segera Disahkan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mendorong agar Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) segera disahkan. RUU yang telah memasuki finalisasi akhir di tingkat badan legislasi dan Komisi X DPR RI di harapkan menjadi salah indikator penunjang peningkatan mutu pendidikan.

“Kita di DPR RI berharap RUU ini bisa menunjang sistem pendidikan tanah air khususnya dalam peningkatan mutu, sehingga semua kepentingan tingkatan pendidikan dari PAUD dan perguruan tinggi kita akomodir,” kata Sutan, usai Rapat Panja RUU Sisbuk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).

Politisi F-Gerindra itu mengatakan, banyak aspek yang perlu di akomodir dalam RUU sebelum di paripurnakan, seperti penambahan tujuan RUU dalam meningkatkan kreativitas dan minat baca



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

anak-anak Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah mengundang banyak ahli hingga

melakukan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

"Banyak dimensi kepentingan yang ingin kita satukan dalam RUU ini, karena kita ingin RUU ini menjadi penunjang mutu dan minat baca masyarakat Indonesia," imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu juga menegaskan, RUU Sisbuk harus mampu menstimulus minat baca di Indonesia dengan standar konten yang jelas dengan harga buku yang terjangkau.

Dalam Rapat Panja ini telah dibahas 14 DIM bersama Pemerintah. Namun ada beberapa poin dalam DIM yang Pemerintah perlu membicarakan lebih dalam, salah satunya terkait pembiayaan. ■

(sf), Foto: Kresno/br

Komisi X Kunjungi Kaltim Bahas Penerima Beasiswa PT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur didampingi 14 Anggota Dewan. Mereka diterima Assisten III Pemprov. Bere Ali didampingi sejumlah Rektor; Poltek Negeri Samarinda, IT Kalimantan, Poltek Pertanian Negeri Samarinda, POLTEKBA, Universitas Mulawarman Samarinda UNIBA dan Kopertis Wilayah XI Prov. Kaltim di Ruang Serba Guna Hotel Platinum Balikpapan guna mendapatkan masukan tentang beasiswa Pendidikan Tinggi, Jumat (16/09).

Menurut Abdul Fikri, kunjungan kali ini berkaitan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 mengatur bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi bagi orang tua yang tidak mampu.

"Kami melakukan komunikasi intensif antara Panja DPR RI Komisi X DPR RI dengan universitas, politeknik dalam berkaitan dengan beasiswa. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU termasuk pelaksanaan APBN. Di sisi lain, menggali dan menyerap aspirasi dari pendidikan tinggi dan masyarakat Kalimantan Timur terkait dengan kendala beasiswa yang dialami. Secara umum kami ingin mendapat masukan berupa data-data tentang permasalahan beasiswa pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur," tegas Fikri.

Disamping itu, kata Fikri, menjadi tugas kita untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pendidikan tinggi melalui beasiswa namun pada saat ini bangsa Indonesia memiliki berbagai macam tantangan antaranya globalisasi penuntutan tenaga terampil dan persaingan tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja luar negeri yang bisa dikatakan masih rendah.

"Berbagai upaya telah dilakukan oleh Menristek Dikti dalam peningkatan



Ketua Tim Kunspek Komisi X Abdul Fikri Faqih

kualitas SDM. Beasiswa ini diberikan kepada masyarakat agar dapat mengenyam pendidikan yang luas, jatah 2010 hingga 2015 Kemenristek Dikti telah memberikan biaya bantuan Bidikmisi kepada 270 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Adapun target dari Panja ini adalah mengevaluasi kebijakan tahap pengelola dan seleksi beasiswa Dikti, sedangkan ruang lingkup panja ini adalah beasiswa S1 terdiri dari Beasiswa Bidikmisi, ADIT, PPA. Kemudian yang kedua adalah Beasiswa S2 dan S3, BPPDN, BPPLN, pendidikan magister menuju doktor untuk Sarjana Unggul.

Dalam sambutannya Assisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Bere Ali mengatakan, bahwa instrumen pertanyaan dari Komisi X DPR RI sudah dikirim dan sudah dijawab sesuai dengan pertanyaan. Dia berharap mudah-mudahan instrumen ini merupakan segala hal yang dibutuhkan terkait dengan beasiswa dan ini bisa diberikan format secara lengkap oleh komunitas pendidikan di Provinsi Kaltim.

"Mereka siap untuk memberikan tambahan-tambahan informasi baik yang ada dalam instrumen pertanyaan maupun pertanyaan yang merupakan aspirasi mereka," kata Bere.

Sementara itu, Wakil Rektor Univ. Mulawarman Mustofa Agung Sarjono menyampaikan secara ringkas jawaban kuisisioner terkait beasiswa. Pihaknya juga menyatakan sangat berterima kasih atas bantuan dan perjuangan Komisi X DPR RI soal beasiswa, meski sangat variatif seperti beasiswa S2 dan S3 yang baru dirasakan 2 tahun belakangan ini. ■

(br, mp) Foto: Hinduhdr

Komisi IV Himpun Masukan Revisi UU No.16/92 di UGM



Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani

Komisi V Bahas Anggaran dan Program Eselon I BMKG, Basarnas, BPLS dan BPWS

Komisi V DPR RI melanjutkan pembahasan alokasi anggaran RAPBN 2017 untuk fungsi dan program masing-masing unit eselon I BMKG, Kepala BASARNAS, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selaku mitra kerja Komisi.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia itu digelar untuk menyesuaikan pagu anggaran belanja masing-masing Kementerian atau lembaga dalam penyusunan program dan kegiatan RKA-K/L RAPBN 2017, berdasarkan usul dan pendapat Komisi V dalam memperjuangkan program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi V Capt. Anthon Sihombing



Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia

memberikan tanggapannya terkait materi program kegiatan yang dibuat oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

(BPWS), dan meminta agar pihak swasta turut serta dilibatkan dalam proyek pengembangan wilayah itu.

"Tolong diperbanyak untuk melibatkan juga pihak swasta, sehingga dalam pekerjaan itu memiliki tujuan yang jelas," ujar Anthon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya, pihak swasta terlihat agak susah untuk ikut berperan, hal tersebut mungkin karena ada ketidakinginan dari pemerintah untuk melibatkan pihak swasta. "Tetapi untuk memajukan ini, sebaiknya melibatkan swasta," tegasnya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Komisi V dalam rapat itu adalah masalah BMKG yang seolah-olah keluar dari tupoksinya. BMKG harus mampu mensosialisasikan hasil-hasil yang didapat kepada jaringan-jaringan dibawahnya.

"Tolong kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena banyak nelayan mereka yang belum mengerti bagaimana cara membaca sistem cuaca. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan ketika melaut," ucap politisi Golkar itu. ■

(dep.wp), Foto: Antri/br

Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani mengusulkan dalam revisi UU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau UU No.16 tahun 1992, harus ada penyempurnaan. "Kita datang kesini untuk mendengar bagaimana masukan dari pakar dan ahli-ahli Universitas Gadjah Mada (UGM) pasal-pasal yang harus direvisi atau ditambah dalam rangka perbaikan," katanya saat bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik di Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Selasa (20/9).

Tim Kunspek Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron melakukan kunjungan spesifik untuk menghimpun masukan dari beberapa pakar dalam pembahasan revisi UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Hamdhani-politisi dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, kaitan dengan UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini aspeknya sangat luas. "Kita ingin mereduksi supaya dalam pelaksanaan nanti di lapangan tidak ada tumpang tindih. Untuk itu faktor-faktor yang nanti mengganjal persoalan-persoalan yang timbul ketika pelaksanaan berjalan ditingkat masyarakat, perlu dihilangkan," ungkapnya.

Menurut politisi Nasdem ini, pihaknya ingin melihat suatu kemudahan, dengan revisi UU itu maka barang-barang yang dikirim baik dari luar negeri atau dari daerah ke luar kota melalui bandara, pelabuhan, laut udara ini dapat terkoneksi dalam satu badan

karantina hewan dan bisa di kontrol dengan baik.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPR RI Sjahrani Mataja berharap nantinya UU ini benar-benar, mengayomi dan mengamankan kedaulatan kita dari hal-hal yang mengganggu permasalahan seperti ikan dan tumbuh-tumbuhan dari luar yang tidak memenuhi syarat.

"Oleh karena itu kedaulatan harus kita pertahankan bukan hanya sebagai serangan bersenjata tapi juga dari hewan, ikan, dan tumbuhan yang terkena virus yang dapat mempengaruhi kondisi kita. Oleh sebab itu, usul adanya perubahan-perubahan UU No.16/92 yang mereka sampaikan ini sangat bagus. Kita berharap ke depan dengan adanya UU Karantina yang baru ini, pelaksanaan karantina dikoordinasikan ini melalui Badan Karantina Nasional," katanya. ■

(arf), Foto: Antri/br

Belum Waktunya Indonesia Gabung *Trans Pacific Partnership*

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan belum saatnya Indonesia bergabung kedalam *Trans Pacific Partnership* (TPP). Ia menegaskan bahwa Indonesia semestinya bisa mengoptimalkan berbagai mitra kerja sama yang saat ini sudah disepakati. Hal itu diungkapkan saat diskusi publik dengan tema "Keberpihakan Industri Nasional" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (16/9).

Soal TPP, saya pikir jangan dulu. Kita sudah punya kerja sama multilateral yang banyak. Apalagi ditambah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Itu yang harus dimaksimalkan," terang Satya.

Politisi Golkar ini pun juga mengingatkan agar Indonesia

bisa mempersiapkan perangkat hukum terlebih dahulu sebelum menyatakan siap untuk bergabung ke TPP. "Kalo kita masuk TPP dan tidak siap perangkat hukumnya. Bayangkan, kita saja sudah masuk MEA apakah sudah ada perangkat hukum seperti UU? Belum ada," papar Satya.

Satya pun juga menyinggung soal MEA yang dalam redaksional terkesan Internasional. "Jadi kalau kita bicara MEA seakan-akan menjadi omongan yang enak agar terlihat Internasional. Tapi perangkat hukumnya tidak menunjang itu," jelasnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah bahasa. Di berbagai negara ASEAN, banyak negara yang sudah mulai belajar bahasa Indonesia, meskipun begitu hal itu tidak diimbangi masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa negara lain. "Bayangin di Vietnam sudah mulai belajar bahasa

Indonesia, di Thailand sudah mulai belajar bahasa Indonesia, di Filipina

juga, lalu Indonesia?," tanya Satya. Ketua Kaukus Ekonomi Hijau ini

menjelaskan harus ada yang diubah secara fundamental agar industri nasional bisa tumbuh dan berkembang di era persaingan global. "Jadi, ada hal fundamental yang harus diubah. Maka kalau kita kembalikan, ini soal strategi makro ekonomi kita," paparnya. ■

(hs), Foto: Nafarjati/hr



Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam acara FGD terkait industri nasional

Imam Soeroso Apresiasi Penghargaan Bagi Sineas Cinta Lingkungan dan Perdamaian

Anggota Komisi IX DPR RI, Imam Suroso mengapresiasi diselenggarakannya *international film festival for peace, inspiration and equality* (IFFPIE) dan *World Humanitarian Awards* (WHA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“ Saya mengapresiasi adanya acara ini, walaupun terbelang terlambat namun hal ini menjadi sebuah bentuk apresiasi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap para sineas internasional yang peduli terhadap lingkungan hidup,” ungkap Imam ketika ditemui di acara malam puncak penghargaan IFFPIE di Auditorium Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (19/9).

Kadin Diharap Berperan Genjot Progresifitas Industri Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengharapkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) berperan menggenjot progresifitas industri nasional. Dia menilai saat ini laju perjalanan industri nasional tak mampu menghadapi persaingan mancanegara. Bahkan dia mengungkapkan Indonesia hanya dijadikan pasar bagi negara-negara produsen.

“ Kami mengharapkan bagaimana Kadin secara komprehensif ikut memikirkan industri kita bisa hidup, berkembang dan bersaing,” ujar Zulfan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Kadin Bernadino dan Ratna Sari di Nusantara I, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).

beranggapan industri nasional yang masih bisa bersaing hanya batu bara, sawit, dan karet. Dia mengatakan dulu tenaga kerja nasional dianggap murah sehingga bisa menarik investasi ke Indonesia, namun saat ini hal tersebut tidak bisa diunggulkan lagi karena beragam persoalan.

"Dulu daya saing kita karena tenaga kerja kita murah, sehingga menarik investasi ke Indonesia. Nah sekarang tenaga



Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan

kerja murah itu sudah tidak menjadi daya saing lagi. Kemudian kondisi politik, hiruk pikuk demonstrasi buruh yang begitu tinggi, akhirnya ini menjadikan orang takut investasi ke Indonesia. dan kita lihat banyak

sekali pabrik-pabrik yang sudah pindah ke Birma, Laos, dan Vietnam," jelasnya.

Dia juga memaparkan, industri nasional tidak mampu menciptakan *brand* secara mandiri. Dia mengusulkan agar Komisi VI dan Kadin perlu diskusi lebih dalam dan konseptual, agar menemukan langkah apa yang harus dilakukan. Setelah itu Kadin bisa membawa usulan tersebut kepada Presiden agar menjadi keputusan.

"Kalaupun ada industri kita yang jalan kita hanya membuat, tetapi tetap menggunakan merek luar, mulai dari mesin air dan elektronik. Komisi VI dan Kadin perlu diskusi lebih dalam dan konseptual, komprehensif, kemudian kita menemukan langkah apa yang harus kita lakukan. Nanti urusan Kadin membawa ini kepada Presiden supaya ini menjadi keputusan," usulnya. ■

(sbo), Foto: Rumi/br

Imam menyadari meski secara kemitraan KLHK ini bukan merupakan mitra dari Komisi IX yang dinaunginya, namun baginya acara ini telah menumbuhkan semangat baru tidak hanya untuk para sineas, melainkan juga masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap lingkungan, bumi dan cinta perdamaian.

"Peduli terhadap lingkungan dan bumi artinya ikut menjaga kesehatan umat manusia. Hal ini secara langsung juga menekan angka kematian sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan itu semua menjadi bidang dari Komisi IX yang merupakan komisi yang saya naungi," paparnya.

Melihat manfaat yang cukup besar dari ajang ini, maka Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini berharap ajang

penghargaan seperti ini dapat terus diselenggarakan secara rutin, alias menjadi salah satu program andalan Kementerian ini. Sehingga semakin menumbuhkan *awareness* atau kesadaran akan cinta lingkungan dan perdamaian di masyarakat luas. Hingga akhirnya, hal ini akan menjadi gerakan sosial yang ikut mempengaruhi kualitas hidup manusia Indonesia dan dunia pada umumnya. ■

(Ayu), Foto: Rumi/br



Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso

Tambahan Kuota Haji, Perlu Lobi Arab Saudi dan OKI

Selaku Anggota Tim Pengawas Haji Tahap II tahun 2015 lalu atau pada saat pelaksanaan ibadah haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim dan rombongan, berkesempatan berdialog dengan Amirul Haj Irak. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, salah satu masalah yang dibahas adalah kuota haji.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/9) Politisi FPP ini menjelaskan, dari pertemuan itu diperoleh informasi bahwa tidak sekedar negara Arab saja yang memutuskan soal kuota haji, tetapi ada kaitannya dengan Organisasi Negara Islam (OKI). Betul bahwa pemilik utama kuota haji adalah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, tetapi indeks pembagian dilakukan Sidang OKI yang kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Mustaqim, sampai saat ini dalam menentukan kuota haji masih menggunakan rumus permil dari penduduk beragama Islam di sebuah negara. Indonesia dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, maka masuk kategori kuota haji terbesar, dibawah itu Irak sekitar 60 ribu dan Malaysia.

Lebih lanjut dikatakan, untuk penambahan kuota haji ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama harus sabar hingga pembangunan Masjidil



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

Haram itu selesai sehingga kuota kembali normal.

Yang kedua adalah dengan diplomasi. Berdasarkan informasi dari teman di Malaysia, juga sudah ada daftar tunggu hingga 40 tahun sehingga sesama negara

Asean seperti Thailand, Myanmar dan Philipina, bila membantu penambahan kuota kepada Indonesia, jumlahnya tidak signifikan. Karena itu harus bernego selain dengan Pemerintah Arab Saudi, juga dengan OKI.

"Di sinilah letak diplomasi Pemerintah itu diuji. Karena tahun lalu Presiden Jokowi sepulang kunjungan dari Arab Saudi minta tambahan kuota 10 ribu, lalu Menteri Agama juga menyatakan mendapat tambahan kuota 10 ribu, berarti ada tambahan 20 ribu," jelasnya.

Tetapi kenyataannya, lanjut Mustaqim, tahun 2016 ini sama sekali tidak ada penambahan kuota. Karena itu *statement-statement* seperti ini tidak etis dan perlu dihindari. "Perlu lebih hati-hati dalam membuat *statement*, sebab masalah ini sangat sensitif," tegasnya lagi.

Selain itu, kata politisi dari Dapil Jateng VIII ini, Pemerintah perlu mengusahakan penambahan kuota khusus yang bersifat *G-to-G* artinya menggunakan visa undangan dari Kerajaan yang kemudian dikonversi. "Ini agak rumit tetapi sebagai salah satu kemungkinan, bisa dilakukan," ia menambahkan. ■

(imp), Foto: Naefarajiz/hr

Bambang Haryo Kritik Harga Energi yang Mahal

Harga energi listrik dan gas yang masih mahal dikritik Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Harga kedua produk energi itu masih terlalu mahal bila dibandingkan harga di negara tetangga.

“ Bambang melontarkan kritiknya di hadapan Pemerintah saat rapat Banggar yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Said Abdullah, Senin (19/9). Harga listrik mahal, karena harga energi primernya yang dijual ke PLN tidak realistis. "Masyarakat sebenarnya bisa mendapatkan harga listrik yang sangat

murah apabila energi primer yang dijual ke PLN itu betul-betul harga yang sebenarnya," kata Bambang.

Politisi Partai Gerindra ini lalu mengungkapkan



Anggota Banggar DPR RI Bambang Haryo Soekartono

temuannya, PLN Balikpapan menggunakan solar sebagai energi primer. PLN Balikpapan harus membeli Rp6.000 per liter. Sedangkan di pasaran harga energi minyak non subsidi hanya Rp4.900 per liter.

Kritik juga disampaikan Bambang menyangkut harga gas. Ia mengungkapkan, harga internasional seperti di Singapura untuk sampai ketangan pengguna harganya 3,8 USD/MMBTU. Di Malaysia sekitar 3,8-3,9 USD/MMBTU. "Mereka membelinya dari Indonesia. Tapi, PLN beli gas yang ditetapkan oleh SKK Migas sendiri seharga 7 USD/MMBTU atau bahkan lebih," ujar Anggota Komisi VI ini.

Bambang menyerukan agar harga gas dikembalikan kehargaanya yang realistis. Ini penting pula untuk membantu pembangunan infrastruktur energi. Menurutnya, infrastruktur energi sangat dibutuhkan oleh jutaan usaha di Indonesia termasuk masyarakat. "Harga elpiji dibandingkan harga LNG dan CNG empat kali lipat dari harga pasar. Ternyata, menggunakan elpiji jauh lebih mahal dari pada CNG," imbuh politisi dari dapil Jatim I ini.

Seperti diketahui, *Liquefied Natural Gas* (LNG) berasal dari gas alam yang digunakan untuk industri dan BBG. Sementara *Compressed Natural Gas* (CNG) berasal dari gas alam untuk BBG. Bambang berharap, sistem perpipaan

bisa masuk kesemua lini kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, harga energi primer yang dibutuhkan masyarakat lebih murah dan tidak perlu lagi subsidi.

"Mohon Pemerintah bisa memperhatikan ini dan bisa mengusahakan, karena masyarakat sudah membayar pajak tanpa ngemplang. Pemerintah harus mengusahakan infrastruktur energi terutama gas dan minyak," harapnya. ■

(sc) Foto: Jakarta/br.

Setjen DPR RI Gelar Pendidikan Koperasi Syariah

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar pendidikan dan pelatihan Koperasi Syariah dan Unit Usaha berbasis Syariah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan kebutuhan anggota koperasi yang menginginkan adanya perubahan sistem keuangan koperasi, dari konvensional ke sistem berbasis syariah.

"Koperasi kita sudah berjalan cukup lama, alhamdulillah sudah maju dan berkembang dengan baik. Tapi, kita juga melihat lingkungan dan kebutuhan dari anggota, dimana saat ini yang berkembang adalah unit usaha konsep syariah, sehingga salah satu unit usahanya yaitu simpan pinjam ingin bertransformasi," ungkap Win, sapaan akrabnya.

Win menjelaskan, prinsipnya Koperasi Syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum. Meskipun demikian, konversi ke sistem berbasis



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dan Ketua Pengurus Koperasi DPR RI Muhammad Djazuli

Syariah tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan seksama, termasuk kesiapan pengurus dan pengelola koperasi.

"Orientasinya adalah kaidah ajaran agama Islam, Al-Quran, Hadits Sunnah-sunnah harus dipelajari betul, tidak hanya oleh peserta tetapi pengurus dan pengawas harus memahami betul konsep

syariah," terangnya.

"Saya harap Koperasi kita bisa lebih maju lagi dengan mengembangkan konsep Syariah, karena kita tahu tetangga kita sebelah, Malaysia sukses mengembangkan industri keuangan Syariah. Padahal, Indonesia itu memulai kenapa kok kita tidak bisa lebih sukses," imbuh Win.

Pendidikan perkoperasian berkelanjutan ini merupakan salah satu program kerja kerja Koperasi Pegawai

Setjen DPR RI untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan potensi ekonomi anggota koperasi. Dalam kesempatan tersebut, hadir nara sumber anggota Komisi III Ahmad Zacky Siradjdan Mahri M. Saleh Konsultan Keuangan Syariah. ■

(ana.mp) Foto: Anief/br

Pengajian Bulanan PIA DPR RI Hadirkan Aa Gym

Ketua umum Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI, Netty Ade Komarudin menilai apa yang menjadi tema ceramah *ustadz* kondang, Abdullah Gymnastiar tentang kebersihan hati sejatinya merupakan kenyataan yang dihadapi sehari-hari oleh seluruh umat manusia. Dengan demikian sangat bermanfaat dan berguna sekali. Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri pengajian rutin bulanan PIA DPR RI di Masjid Baiturrahman, Senayan Jakarta, Rabu (21/9).

“Awalnya tema pengajian kali ini tentang hak dan kewajiban wanita, namun Aa Gym, begitu ia biasa disapa, meminta izin untuk memberikan ceramah tentang ilmu tauhid, yakni kebersihan hati. Dan ternyata hal itu sangat bermanfaat karena memang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bisa langsung diterapkan saat ini juga,” ungkap Netty.

Ditambahkan Netty, sebagai manusia yang tidak sempurna, ia memastikan dirinya dan seluruh Anggota PIA terkadang memiliki kekhilafan dalam bersikap. Misalnya merasa sombong akan jabatan sang suami dan segalanya. Oleh karena itu, lewat ceramah Aa Gym itu kembali mengingatkannya dan seluruh Anggota PIA untuk kembali kepada jatidiri yang



Foto bersama PIA DPR RI dengan KH. Abdullah Gymnastiar usai pengajian bulanan

sebenarnya, dimana kedudukan manusia sama dimata Sang Khalik.

Sementara jabatan, harta dan tahta yang dimilikinya dan suami semata hanya titipan yang akan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Allah SWT. Dengan begitu ia menilai bahwa ceramah dan pengajian yang rutin

menghadapi masalah hidup, yakni siap menghadapi yang cocok dan tidak cocok dengan keinginan kita, kalau sudah terjadi ketentuan Allah SWT harus ridho. Resep ketiga adalah jangan mempersulit diri, keempat evaluasi diri, dan resep kelima adalah cukuplah Allah SWT sebagai penolongku.■

diselenggarakan PIA DPR RI sangat bermanfaat bagi dirinya, anggota PIA dan seluruh jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut.

Sementara itu dalam ceramahnya Aa Gym menjelaskan ada lima resep

(ayni), Foto: Juhar/br



Ketua Baleg Supratman Andi Agtas

Baleg Dorong Pembentukan Badan Pangan Nasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong pembentukan lembaga yang menangani pangan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Panja Karhutla Terima Masukan Pansus DPRD dan LSM Riau

Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI menerima masukan dari panitia khusus (Pansus) Kebakaran hutan DPRD Riau, dan sejumlah LSM pemerhati lingkungan seperti Walhi, ICEL dan Jikalahari terkait terbitnya SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) atas kasus Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

“ Ada beberapa temuan yang disampaikan dalam RDP tadi, pertama terkait permasalahan hukum, terbitnya SP3. Ada permasalahan dalam penegakan hukum disini. Mereka meminta untuk ditindaklanjuti, termasuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (20/9).

Pansus Karhutla DPRD Riau lanjut Benny, mengungkapkan kerugian negara akibat praktek yang dilakukan oleh perusahaan tersangka pembakaran hutan. Tidak hanya kerugian fisik, seperti bencana asap yang sempat menelan korban jiwa, juga kerugian dalam sektor ekonomi.

"Coba bayangkan, ada perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki perkebunan, dan sekian juta hektar lahan



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman

yang tidak ada ijin penanaman sawit, lalu sawitnya dijual tidak ada pajaknya. Coba dihitung berapa kerugian negara disitu," jelas Benny.

Sementara itu terkait masukan dari beberapa LSM pemerhati lingkungan adalah adanya perusahaan besar yang menjadi tersangka penerima SP3 dari

Kepolisian, tapi setiap tahun melakukan hal yang sama (tersangka pembakaran hutan dan lahan-red), namun selalu lolos dalam kasus tersebut.

Tidak hanya itu, Panja Karhutla Komisi III DPR RI juga menerima masukan dalam sisi legislasi dan regulasi. Dimana menurut Henri Subagyo dari ICEL ada beberapa regulasi yang menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Salah satunya peraturan menteri pertanian (Permentan) No,11 Tahun 2012 tentang ketentuan yang membolehkan perusahaan kelapa sawit hanya memiliki dua puluh persen tandan buah dari lahannya sendiri. sementara sisanya yang berjumlah delapan puluh persen bisa diambil dari lahan masyarakat kecil. Kondisi ini memunculkan celah bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan baru. ■

(Ayu), foto : rmt/br

"Itu wajib karena sudah diamanatkan dalam UU dengan menyebutkan pembentukan sebuah lembaga pangan nasional," ungkap Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat Rapat Kerja dengan Menteri PAN-RB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/09).

Politisi F-Gerindra itu mengungkapkan, pembentukan lembaga yang *powerfull* sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, tetapi harus mampu mengakses penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi, stok dan stabilitas harga.

Untuk diketahui, saat ini penugasan ketahanan pangan nasional

dijalankan oleh empat lembaga maupun Kementerian, yakni Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN.

Sehingga dinilai kurang teroganisir dengan baik dan tumpang tindih, karena UU sektoral lain memberikan mandat yang sama di bidang pangan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

"Kita berharap dengan adanya lembaga yang bertanggungjawab penuh, maka tidak lagi terjadi saling menyalahkan diantara Kementerian terkait. Lembaga inilah yang berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan memiliki kewenangan secara penuh untuk

mengatur segala hal yang berhubungan dengan pangan," tandasnya.

Terkait hal tersebut, Menpan RB yang baru Asman Abnur mengatakan pihaknya akan segera melakukan pendalaman dengan melakukan beberapa kajian terkait pembentukan lembaga tersebut.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama, dengan irisan UU sebelumnya saya harapkan badan yang terbentuk ini punya kekuatan hukum secara komprehensif," jelas mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu. ■

(ann.mp), Foto: Nefirajibr

Penyelenggara PON dan Peparnas 2016 Targetkan Catur Sukses

Penyelenggara Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) 2016 menargetkan catur sukses yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi penyelenggaraan, dan sukses ekonomi masyarakat.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Tim kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sekaligus Ketua PON dan beserta Pengurus Besar PB PON Peparnas 2016 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, (21/9).

Lebih lanjut Fikri memaparkan pertama terkait preatasi, sejak PON mulai sejak 17 September lalu Provinsi Jabar sulit tertandingi oleh provinsi lain dalam perolehan medali. Hingga sampai saat ini, Jabar masih menduduki peringkat pertama, lalu disusul peringkat kedua yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur.

"Kenaikan itu, jika dilihat dari PON sebelumnya dimana Jabar berada di peringkat ke dua di PON ke 18 pada tahun 2012, kemudian peringkat ke 4 di PON 2008 dan peringkat ke 3 di PON 16 2004. Prestasi Jabar meningkat terus menerus," terang Fikri.

Politisi F-PKS itu melanjutkan, terkait informasi suksesnya penyelenggaraan yang diterima DPR RI, ternyata kondisi di lapangan masih ditemui banyak kekurangan seperti venue dan peralatan pertandingan hingga akses menuju arena olahraga.

"Namun sejauh ini panitia penyelenggaraan PON ke XIX 2016 mampu mengatasi berbagai persoalan. Kami justru mengapresiasi Pemprov Jawa Barat yang sudah bekerja keras dengan dana Rp100 miliar dari dana APBN dan dana seluruh penyelenggaraan PON dan Peparnas sekitar Rp3 triliun," tambahnya.

Berikutnya, lanjut Fikri, terkait sukses administrasi, DPR RI berharap kepada penyelenggara PON, maupun Peparnas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menyusun transparan dan tertib administrasi serta sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menyisakan masalah hukum.



Tim kunjungan spesifik komisi X DPR RI bersama dengan atlet Volley PON XIX di Kawasan Sijalakarupat

"Terkait sukses ekonomi masyarakat, kami berharap UMKM yang tersebar di kabupaten kota ini ikut merasakan dampak langsung dari penyelenggaraan PON dan Peparnas 2016, dengan adanya 16 venue yang di miliki kabupaten kota di Jabar," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Seperti diketahui, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan spesifik dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan PON XIX 2016 yang berlangsung 17 hingga 29 September serta meninjau ke venue-venue pertandingan. dan persiapan Peparnas ke 15 yang akan dilaksanakan 15 sampai 24 oktober 2016.

Diharapkan dengan penyelenggaraan event olahraga nasional tersebut dapat tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjanging bibit atlet potensial, dan meningkatkan prestasi olah raga.

"Penyelenggaraan PON harus bermuara pada atlet Internasional SEA Games hingga Olimpiade demikian juga penyelenggaraan Peparnas harus bermuara pada atlet penyandang disabilitas," harap Fikri.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur dan juga Ketua PON XIX Ahmad Heryawan menjelaskan sejumlah poin-poin berlangsungnya kegiatan PON

ke XIX . Cabang olahraga yang ditandingkan sebanyak 44 cabang olahraga. Dan yang mempertandingkan 12 cabang olahraga XBC. Untuk nomor pertandingan yang di pertandingkan ada 756 nomor. Medali yang akan diraih dengan jumlah 756 medali emas dan perak serta jumlah keseluruhan medali yakni 2490 Emas 756 perak 756 perunggu 980 plus dasi kobo panca warna.

Ditambahkan Gubernur, sampai saat ini dari 756 pertandingan yang sudah terselesaikan, dimana sebanyak 211 cabang olahraga atau sudah mencapai 28 persen. Gubernur pun menjelaskan, mengenai maskot atau simbol dari PON ke XIX ini berupa satwa yang sudah hampir punah yaitu berupa hewan mamalia yang bisa jadi simbol semua cabang olahraga yang dipertandingkan.

Adapun yang mengikuti kunjungan spesifik ini diantaranya, Anggota Komisi X DPR RI dari F-PDIP Asdi Narang, Sofyan Tan, dan Junico BP Siahaan. Dari F-PG Popong Otje Djundjungan, dan Marlinda Irwanti. Kemudian Rinto Subekti (F-Partai Demokrat), Yayuk Basuki (F-PAN), Anang Hermansyah (F-PAN), Reni Marlinawati (F-PPP), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). ■

(rni) foto: rami/um



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam acara FGD terkait RUU Karantina

DPR RI Komitmen Jaga Kedaulatan Pangan Melalui RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan DPR RI berkomitmen dalam menjaga kedaulatan pangan sekaligus mewujudkan badan karantina sebagai badan yang mampu menjaga produk petani, nelayan, dan produk-produk industri lokal nasional dari serangan produk asing dimana saat ini kondisi 'perang ekonomi' semakin kencang.

Daniel menegaskan, komitmen itu diwujudkan dengan kerapnya Komisi IV DPR RI melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mendapatkan masukan mengenai Panitia Kerja (Panja) RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

"Komisi IV DPR RI hari ini datang ke Universitas Brawijaya, Malang, untuk mendapatkan masukan mengenai Panja RUU Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Karena nanti badan nasional karantina menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan pangan termasuk menjaga produk-produk petani dan nelayan serta industri nasional," kata Daniel Johan kepada Parlemen, usai melakukan pertemuan FGD dengan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (20/9).

Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh Daniel Johan itu hadir sejumlah anggota Panja, diantaranya; OO Sutisna (Fraksi Partai Gerindra), Eko Hendro Purnomo (F-PAN), Hermanto (F-PKS), Taufiq R Abdullah (F-PKB) dan Sulaeman L Hamzah (F-Nasdem).

Menurut politisi F-PKB itu, banyak masukan yang didapat saat melakukan pertemuan dengan civitas Universitas Brawijaya, selain masukan bahwa keberadaan lembaga atau badan karantina nasional sebagai kebutuhan penting, masukan lainnya adalah ketentuan bahwa produk asing terutama produk makanan yang

masuk ke Indonesia harus aman dan halal.

"Syarat halal itu wajib masuk di dalam UU, karena syarat halal itu saat ini sebagai bumper terkuat kita untuk menyetop serangan dari produk-produk asing. Termasuk dalam konteks banyak hal, khususnya ternak. Karena kalau tidak, kita habis nih sama Brasil," ujarnya.

Khusus soal badan karantina, jelas Daniel Johan, sebetulnya tidak dalam konteks membentuk badan baru seperti halnya Badan Restorasi Gambut. Badan karantina, sejatinya kata Daniel Johan sudah ada, bahkan fungsi, SDM dan anggarannya sudah eksis, namun keberadaannya ada di kementerian masing-masing, seperti badan karantina di Kementerian Pertanian, badan karantina di Kementerian Kelautan dan ada juga badan karantina di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Karena terpecah-pecah, jadi tidak efektif hingga nanti kita leburkan saja menjadi badan karantina nasional langsung dibawah presiden, sehingga dia menjadi badan yang sangat *power full* dalam konteks menjaga kepentingan nasional," tambah politisi asal dapil Kalimantan Barat itu.

Untuk itu, ia berharap hal ini segera rampung sehingga ada kesepakatan DPR RI bersama pemerintah. "Kita akan *support* pemerintah untuk segera dibentuk badan nasional karantina dibawah presiden langsung," katanya. ■

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR RI meninjau rusun Rawa Bebek dan berdialog dengan warga setempat perihal aduan kasus tewasnya bocah tiga tahun di rusun tersebut. Jum'at (16/9). Foto: Kresno

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany melantik tiga Kepala Bagian dan dua Kepala Sub Bagian di lingkungan Setjen DPR, Rabu (21/9). Foto: Jaka



Pengajian rutin bulanan Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI dengan tema "Tauhid" menghadirkan KHI. Abdullah Gymnastiar di Masjid Baiturrahman, Senayan, Rabu (21/9). Foto: Jaka